

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media bagi entitas untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik sehingga laporan keuangan harus mampu menyajikan laporan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Reformasi keuangan pemerintah berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan dapat mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya secara transparan serta memberikan informasi yang berkualitas. Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. (Yuliani et al, 2010)

Menurut Wati, dkk (2014) untuk menghasilkan laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Sumber daya manusia merupakan kunci

keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan.

Selain itu hal mendasar dan penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No 59 Tahun 2007).

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur dimulai proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Selain berpedoman pada sistem akuntansi keuangan daerah penyusunan laporan juga berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 standar akuntansi merupakan pedoman didalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nordiawan (2006)

menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu fungsinya adalah menggambarkan kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Laporan keuangan untuk tujuan umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. (PSAP No 01 Tahun 2005).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti halnya permainan anggaran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah dilingkup pacitan mengenai belanja bahan bakar minyak (BBM), hal ini terkuak dari hasil audit BPK atas tata kelola APBD tahun anggaran 2017. BPK melakukan pemeriksaan tematik pada tata kelola administrasi keuangan di sejumlah OPD. BPK mengumpulkan data-data mulai dari jumlah petugas, pembagian shift, hingga kouta penjualan BBM, serta spesimen tanda tangan petugas dan stempel. (<https://m.kumparan.com>)

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh laporan keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Roviyantie (2011) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Sejalan dengan Roviyantie (2011) penelitian Andini dewi dan Yusrawati (2015) menyatakan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Wati, dkk (2014) kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah peneliti Rahayu liza, dkk (2014) juga menyatakan bahwa ketiga tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bermaksud mereplikasi dari penelitian Setyawan (2015) dengan waktu, tempat dan variabel yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.** (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan ?
- b. Bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan ?
- c. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan ?
- d. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan
- c. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

- d. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan ?

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik

b. Bagi Organisasi Sektor Publik atau Pihak yang Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang berguna bagi pemerintah kabupaten Pacitan khususnya OPD untuk semakin meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan dalam Kompetensi Sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan.

d. Bagi Peneliti Yang Akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan

penkajian konsep tentang bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

